

**ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA
SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN MONETER DALAM MENANGANI INFLASI
MENGUNAKAN PENERAPAN ITF (INFLATION TARGETING FRAMEWORK)**

**Achmad Fauzi^a, Rudi Laksono^b, Balqis Al Humaira^c, Fitri Amaliyah Sholehah^d, Nur Hikmah^e,
Putri Netasya Sari^f, Syifa Febyca Permadi^g, Tiwi Nurnezi^h**

^aDosen Fakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, achmad_fauziok@ yahoo.com, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

^bDosen Fakultas Ekonomi/Jurusan Manajemen, r_laksono@ yahoo.com, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

^cFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, balqisalhmr200217@ gmail.com, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

^dFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, fitriamlyh25@ gmail.com, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

^eFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, hikmah2429b@ gmail.com, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

^fFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, netasyapoetri@ gmail.com, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

^gFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, febycasyifa@ gmail.com, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

^hFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, tiwinurnezi26@ gmail.com, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

ABSTRACT

This study aims to analyze the status and position of Bank Indonesia in dealing with inflation through the application of the Inflation Targeting Framework (ITF). Law No. 3 of 2004 confirms that BI as an independent central bank has an important role in implementing monetary policy to improve price stability and economic growth. However, there are still several problems in maintaining financial system stability and rescuing the economy. In the face of an increase in the inflation rate in Indonesia due to the global financial crisis, Bank Indonesia officially implemented ITF in July 2005. At the beginning of its implementation, the inflation target in Indonesia was set at 6% with a tolerance range of 1%, with the aim of controlling inflation through the previous monetary policy. using base money. This research was conducted using a qualitative research method using document analysis and library research. The research results show that Bank Indonesia's independent status and position are important to ensure the effective implementation of monetary policy. The ITF framework implemented in Indonesia plays an important role in achieving price stability through controlling inflation. However, the effectiveness of implementing ITF needs to be evaluated to determine how big the impact is. In implementing the ITF, there are opinions that are pro and con regarding the effectiveness of ITF monetary policy in Indonesia. Therefore, Bank Indonesia is expected to increase transparency and consistency in the implementation of these policies.

Keywords: Bank Indonesia, Monetary Policy, Inflation, ITF.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kedudukan Bank Indonesia dalam menangani inflasi melalui penerapan kerangka kerja Inflation Targeting Framework (ITF). Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 menegaskan bahwa BI sebagai bank sentral yang independen memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter untuk meningkatkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melakukan penyelamatan perekonomian. Dalam menghadapi peningkatan tingkat inflasi di Indonesia akibat krisis keuangan global, Bank Indonesia secara resmi menerapkan ITF pada bulan Juli 2005. Pada awal penerapannya, sasaran inflasi di Indonesia ditetapkan sebesar 6% dengan rentang toleransi 1%, dengan tujuan mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter yang sebelumnya menggunakan nilai uang primer (base money). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan analisis dokumen dan kajian pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status dan kedudukan independen Bank Indonesia penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif. Kerangka kerja ITF yang diterapkan di Indonesia berperan penting dalam mencapai stabilitas harga melalui pengendalian inflasi. Namun, efektivitas penerapan ITF perlu dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Dalam penerapan ITF, terdapat pendapat yang pro dan kontra mengenai efektivitas kebijakan moneter ITF di Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Kebijakan moneter, Inflasi, ITF

1. PENDAHULUAN

Bank Indonesia dalam status dan kedudukannya sebagai bank sentral yang Independen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Republik Indonesia sebagai bank sentral yang Independen. Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga nilai rupiah terhadap inflasi dan mata uang negara lain dalam nilai tukar mata uang asing. Berbeda dengan departemen lainnya, Bank Indonesia memiliki kedudukan yang terbebas dari campur tangan lembaga lainnya. Status dan kedudukan istimewa Bank Indonesia diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya sebagai otoritas moneter dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien (Graziani, 2018).

Meskipun Bank Indonesia mempunyai peran dan fungsi penting dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Tantangan utama yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah menjaga stabilitas di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dalam kaitan ini, tantangan kebijakan moneter adalah menahan tekanan inflasi yang meningkat tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Bukan rahasia lagi bahwa pengendalian inflasi sulit dilakukan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Hakim, 2012).

Krisis mata uang (moneter) yang timbul pada pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan naiknya tingkat inflasi yang cukup besar di Indonesia, Inflasi adalah sebuah permasalahan klasik dalam ekonomi yang bisa menyebabkan penurunan pendapatan riil masyarakat berdampak negatif terhadap ekonomi makro dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, masalah inflasi merupakan indikator yang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi (Santosa, 2017).

Bank Indonesia mengimplementasikan kerangka kerja itu disebut Inflation Targeting Framework (ITF) untuk menerapkan kebijakan moneternya dalam rangka menjaga inflasi. Pada Juli 2005, Bank Indonesia secara resmi memperkenalkan ITF sebagai pengganti kebijakan moneter sebelumnya dengan menggunakan uang primer (Base Money) sebagai target untuk menahan inflasi. Bank Indonesia beralih ke ITF karena sistem Base Money tidak lagi sesuai dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia. Harapannya, dengan menerapkan ITF, Bank Indonesia dapat lebih efektif dalam mengendalikan inflasi (Saragih, 2015).

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan sebuah Bank Sentral yang dapat disebut dengan bank to bank. BI berperan sangat vital dan sangat dibutuhkan. Sebab, kemajuan dalam industri apapun biasanya membutuhkan pembiayaan yang diperoleh melalui sektor keuangan, khususnya perbankan. Bank Indonesia juga mengelola uang masyarakat, memastikan bahwa uang tersebut dikembalikan kepada masyarakat untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan program pemerintah dengan tujuan pembangunan negara. Bank Indonesia tidak hanya menangani masalah dana perbankan saja, namun juga harus mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan perbankan. Bank Indonesia juga memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk melaksanakan fungsi bidang moneter yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah (Patimbano, 2016).

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki status sebagai bank sentral Republik Indonesia yang independen, yang berarti memiliki kemerdekaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa campur tangan dari pemerintah maupun pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Bank (Graziani, 2018).

2.2 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter didefinisikan sebagai suatu kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan diberlakukan dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan stabilitas nilai rupiah yang akan dilakukan melalui pengaturan pertumbuhan jumlah uang beredar atau kenaikan suku bunga (Kasmir, 2015:390).

Kebijakan moneter didefinisikan sebagai suatu kebijakan otoritas moneter yang tujuannya untuk melindungi dan memelihara stabilitas keuangan yang dapat mempengaruhi keseimbangan lain dalam perekonomian. Dimana implementasi kebijakan moneter dan target operasional dapat berpengaruh pada ekonomi dan keuangan sebelum mempengaruhi sasaran inflasi pada akhirnya (Kumaat dan Mandeij, 2019).

2.3 Inflasi

Sebagaimana ditulis (Suseno dan Astiyah 2010) dalam jurnal (Ikhsan, 2020). Secara makro ekonomi, istilah inflasi mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa yang meluas dan berkelanjutan. Inflasi merupakan

indikasi bahwa tingkat harga secara umum terus meningkat. Kenaikan harga satu atau dua komoditas tidak dianggap inflasi kecuali jika hal itu memperpanjang (atau memicu) kenaikan harga di sebagian besar komoditas lainnya (Boediono, 2014:161). Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga komoditas yang disebabkan oleh asimetri dalam program pengadaan komoditas (produksi, biaya pembelian, pencetakan uang, dan sebagainya) (Putong, 2013:147).

2.4 Inflation Targeting Framework (ITF)

ITF merupakan kerangka kerja untuk mencapai tujuan inflasi ke depan yang dideklarasikan secara publik sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab bank sentral (Perry dan Solikin, 2016:310). Dalam buku (Perry dan Solikin, 2016:316). Sebagai kerangka kerja kebijakan moneter, ITF merupakan pengaturan dalam perumusan dan implementasi kebijakan moneter, menyangkut pengaturan institusional, implementasi kebijakan moneter dan implikasi organisasi bagi bank sentral (Schaechter et al., 2000).

Inflation Targeting Framework (ITF) memiliki karakteristik khusus, yakni dari bank sentral resmi adanya pemberitahuan yang didukung oleh undang-undang dan berfungsi sebagai akhir dari tujuan kebijakan moneter untuk mencapai dan mempertahankan inflasi pada tingkat yang rendah, dan juga pemberitahuan sasaran inflasi pada masyarakat. Pengumuman itu mengundang maksud bahwa bank sentral membuat janji serta jaminan publik bahwa kebijakan moneternya selalu ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan bahwa bank sentral diminta pertanggungjawaban atas kebijakannya ketika tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai (Tommy dan Dio, 2017).

Tabel 1: Penelitian sebelumnya yang relevan

No	Judul Pengarang (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
1	“Kedudukan Hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2009” Jeslyn Pinem, dkk. (2021)	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan yang independen berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999”	“Jurnal ini menjelaskan tentang status dan kedudukan independen penting bagi BI sebagai otoritas moneter”	“Penerapan dan efektivitas ITF BI tidak dibahas dalam jurnal ini”
2	“Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia” Sekar Anggun dan Gading Pinilih. (2017)	“Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa status dan kedudukan BI adalah sebagai Bank Sentral”	“Jurnal ini menjelaskan Bank Indonesia memiliki tugas menjalankan kebijakan moneter”	“Penerapan dan efektivitas ITF BI tidak dibahas dalam jurnal ini”
3	“Suatu tinjauan terhadap kelembagaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 2009.” Darisa. J (2021)	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia dibidang moneter”	“Jurnal ini menjelaskan otoritas moneter mempunyai hubungan yang erat dengan tugas dan fungsi BI”	“Penerapan dan efektivitas ITF BI tidak dibahas dalam jurnal ini”
4	“Studi Literasi Pengendalian Inflasi Menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF) Dalam Mengendalikan Tingkat Inflasi” Mochammad Al-Ikhsan. (2020)	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk mengatasi masalah inflasi, BI selaku pelaku kebijakan moneter mencoba untuk menerapkan sistem Inflation Targeting Framework (ITF)”	“Jurnal ini menjelaskan tentang penerapan sistem Inflation Targeting Framework (ITF)”	“Peran dan fungsi Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter tidak dibahas dalam jurnal ini”

5	“Penerapan Flexible ITF (Inflation Targeting Framework): Sinergitas Kebijakan Moneter Indonesia dengan Sasaran Kestabilan Harga” Pusriadi T dan Darma D.C. (2017)	“Hasil penelitian ini menunjukkan tentang BI yang mengamanatkan kebijakan moneter berdasarkan pada kerangka kerja yang dikenal dengan sebutan Inflation Targeting Framework (ITF)”	“Jurnal ini menjelaskan Penerapan kerangka kebijakan ITF diyakini dapat membantu Bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan harga”	“Status dan kedudukan Bank Indonesia tidak dibahas dalam jurnal ini”
6	“Inflation targeting framework dan perubahan respon kebijakan moneter” Arif Setiawan. (2012)	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan ITF di Indonesia membuat kebijakan moneter menjadi meningkat terhadap inflasi”	“Jurnal ini menjelaskan penerapan di Indonesia ditandai dengan kenaikan tajam respon terhadap inflasi”	“Status dan kedudukan Bank Indonesia tidak dibahas dalam jurnal ini”
7	“Full-Fledged Inflation Targeting Framework dan Persistensi Inflasi” Rachman Hakim. (2015)	“Hasil penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas Inflation Targeting Framework yang telah dijalankan Bank Indonesia”	“Dalam Jurnal ini efektivitas Inflation Targeting Framework terdapat pro dan kontra”	“Status dan kedudukan Bank Indonesia tidak dibahas dalam jurnal ini”
8	“Economic Performance and Inflation Targeting in Developing Economies” Olfa Manai Dabbousi (2014).	“Hasil penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas Inflation Targeting Framework yang telah dijalankan Bank Indonesia”	“Dalam Jurnal ini efektivitas Inflation Targeting Framework dianggap efektif”	“Status dan kedudukan Bank Indonesia tidak dibahas dalam jurnal ini”
9	“Efektivitas rezim kebijakan inflation targeting framework (ITF) terhadap inflasi di indonesia” Briliant, D. (2020)	“Hasil penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas Inflation Targeting Framework yang telah dijalankan Bank Indonesia”	“Jurnal ini menyatakan pencapaian atas kebijakan ITF belum dapat dikatakan memuaskan, karena ITF meleset jauh dari target.”	“Status dan kedudukan Bank Indonesia tidak dibahas dalam jurnal ini”
10	“The Role of the Central Bank in Promoting Sustainable Growth: Perspectives on the Implementation of Flexible ITF in Indonesia” Solikin M. Juhro (2015)	“Hasil penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas Inflation Targeting Framework yang telah dijalankan Bank Indonesia”	“Jurnal ini menjelaskan tentang keberhasilan bank sentral dalam menerapkan ITF untuk menurunkan inflasi”	“Status dan kedudukan Bank Indonesia tidak dibahas dalam jurnal ini”

3. METODE PENELITIAN

Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan informasi melalui cara dokumentasi. “Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian” (Sugiyono, 2010). Metode dokumentasi ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (library research), dimana mengkaji teori berdasarkan penelitian yang bersumber dari Buku, Ebook, Google Cendekiawan dan media online lainnya.



Gambar 1. Conceptual Framework

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Status dan Kedudukan Bank Indonesia sebagai Pelaksana Kebijakan Moneter

Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia adalah lembaga independen yang berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Republik Indonesia. Keberadaan status dan kedudukannya yang independen tersebut menjadi penting bagi Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dengan lebih efektif serta efisien.

Bank Indonesia memiliki tiga tanggung jawab utama yang diatur oleh Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 8. Tanggung jawab tersebut meliputi pembuatan dan pertanggungjawaban atas kebijakan moneter, memastikan kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan memantau bank. Namun, saat ini tugas mengatur dan memantau bank telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. (Pinem, 2021).

Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan moneter secara konsisten, berkelanjutan, dan transparan, sambil mempertimbangkan kebijakan ekonomi umum pemerintah, antara lain :

- a) Menentukan jenis dan harga mata uang
- b) Mencegah laju inflasi
- c) Mengatur persyaratan pinjaman dan pembiayaan
- d) Penetapan tingkat diskonto dan penetapan giro wajib minimum (Anggun, 2017).

Mengingat Bank Indonesia sebagai bank sentral bertanggung jawab mengatur nilai rupiah, sulit bagi bank sentral untuk melakukannya tanpa kewenangan pengawasan bank. Selain memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga memiliki fungsi dan peran penting untuk mendukung pengembangan pasar keuangan serta perkembangan perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan moneter bank sentral berpengaruh pada suku bunga, tingkat kredit, serta pertumbuhan uang beredar, yang tidak hanya berdampak pada pasar keuangan melainkan pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Darisa .J, 2021).

Berdasarkan pendapat para peneliti melalui suatu jurnal penelitian sebelum ini, kami menyimpulkan bahwa Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia memiliki status dan kedudukan independen dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dengan lebih efektif dan efisien. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan moneter secara konsisten, berkelanjutan, dan transparan, serta mempertimbangkan kebijakan ekonomi umum pemerintah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia bertanggung jawab mengatur nilai rupiah dan memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan pasar keuangan serta perkembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, status dan kedudukan independen Bank Indonesia sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien untuk kepentingan ekonomi nasional.

4.2 Penerapan ITF dalam Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank Indonesia

ITF pertama kali digunakan dalam situasi krisis ekonomi Indonesia pada akhir 1990-an setelah mengalami perubahan struktural di bidang ekonomi. Bernanke dan Mishkin (1997) ITF didefinisikan sebagai pendekatan kebijakan moneter yang menempatkan inflasi sebagai tujuan utama dan meliputi implementasi serta komunikasi target dari rencana kebijakan fiskal, transparansi bagi bank sentral untuk mencapai target inflasi

yang diamankan. Sebelumnya, pada 1970-an, kebijakan moneter ITF cenderung menggunakan pertumbuhan uang sebagai target utama, tetapi pada 1980-an kebijakan moneter mengalami perubahan dengan fokus pada penurunan inflasi dan peningkatan kemandirian bank sentral. Pendekatan ITF pertama kali diterapkan oleh Selandia Baru pada tahun 1990, dan kemudian diikuti oleh beberapa negara lain seperti Inggris, Kanada, Swedia, Australia, dan Finlandia (Setiawan,2012).

Menurut penelitian (Ikhsan,2020) Pada pertengahan 2005, ITF (Inflation Targeting Framework) diterapkan untuk memperkuat kebijakan moneter dengan tujuan mencapai stabilitas harga. ITF (Inflation Targeting Framework) digunakan sebagai target operasional kebijakan moneter sebagai pengganti kerangka kebijakan uang primer (base money targeting) yang dianggap tidak cukup efektif dalam mengendalikan inflasi dan jumlah uang yang beredar. ITF dianggap sebagai solusi yang penting untuk mengatasi masalah inflasi dan pengendalian uang primer.

Menurut penelitian (Pusriadi dan Darma, 2017) ITF diterapkan untuk membantu bank sentral mencapai stabilitas harga dengan cara menetapkan sasaran kebijakan moneter yang jelas. Sasaran ini didasarkan pada proyeksi dan target inflasi di masa depan yang ditetapkan dengan tujuan menjaga stabilitas harga.

Menurut penelitian (Setiawan, 2012) Setelah penerapan ITF di Indonesia pada bulan Juli 2005, terjadi peningkatan yang signifikan dalam mengatasi inflasi. Peningkatan ini terjadi pada kuartal keempat tahun 2005, yaitu setelah satu triwulan penerapan ITF. Namun, tanggapan terhadap inflasi kemudian turun pada tahun 2007 dan mencapai tingkat terendah pada tahun 2008.

Berdasarkan pendapat para peneliti melalui suatu jurnal penelitian sebelum ini, kami menyimpulkan bahwa penerapan ITF di Indonesia didorong oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 dan keinginan untuk memperkuat kebijakan moneter dalam mencapai kestabilan harga. ITF dianggap lebih efektif daripada kerangka kebijakan base money targeting yang digunakan sebelumnya dalam mengatasi inflasi. ITF membantu bank sentral menetapkan sasaran kebijakan moneter secara eksplisit didasarkan pada perkiraan dan sasaran inflasi di masa depan. Meskipun terjadi penurunan respons terhadap inflasi pada tahun 2007 dan 2008, tiga penelitian menunjukkan bahwa penerapan ITF di Indonesia berperan penting dalam mencapai stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi.

4.3 Efektivitas dari Penerapan ITF bagi Bank Indonesia sebagai Pelaksana Kebijakan Moneter dalam Menangani Inflasi

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah menerima kerangka kebijakan ITF yang dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Republik Indonesia Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 2004. Namun pada awal masa penerapan penggunaan ITF telah terdapat banyak permasalahan yang bermunculan, salah satunya ialah target inflasi Bank Indonesia yang berubah menjadi tidak meyakinkan masyarakat dan inflasi BI belum terasa keberadaannya (Juhro, 2015).

Pada tahun 2008, dunia mengalami krisis ekonomi dunia yang dimulai di Amerika Serikat dan meluas ke negara lain, termasuk Indonesia. (Herawati, H dan Gustan, M, 2020). Menurut data dari Bank Indonesia, inflasi di Indonesia pada tahun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007. Fakta ini menunjukkan adanya kenaikan inflasi yang signifikan, Bahkan melebihi sasaran inflasi yang telah ditentukan Bank Indonesia.

Tabel 1. Target Inflasi Indonesia dan Inflasi Aktual Indonesia

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual (% ,yoy)
2005	6+1%	17,11
2006	8+1%	6,60
2007	6+1%	6,59
2008	5+1%	11,06
2009	4,5+1%	2,78
2010	5+1%	6,96
2011	5+1%	3,79
2012	4,5+1%	4,30
2013	4,5+1%	8,38
2014	4,5+1%	8,36
2015	4+1%	3,35
2016	4+1%	3,02

2017	4+1%	3,61
2018	3,5±1%	3,13
2019**	3,5±1%	2,72
2020**	3±1%	1,68
2021**	3±1%	1,87
2022*	3±1%	
2023*	3±1%	

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan statistik sasaran inflasi dan inflasi aktual di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023, atau setelah berdirinya ITF, beberapa sasaran inflasi masih belum terpenuhi. Pada tahun 2005, sasaran inflasi adalah 6+1%, tetapi inflasi aktual adalah 17,11%; pada tahun 2008, sasaran inflasi adalah 5+1%, namun inflasi aktual adalah 11,06%; pada tahun 2010, sasaran inflasi adalah 5+1%, namun realisasi inflasi adalah 6,96%; dan pada tahun 2014, sasaran inflasi adalah 4,5+1%, namun inflasi aktual adalah 8,36%. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia (Bank Indonesia) tetap fokus pada inflasi.

Secara umum, efektivitas kebijakan moneter target inflasi (ITF) harus sejalan dengan temuan empiris dari berbagai penelitian yang memberikan justifikasi kuat bahwa dalam arti yang lebih luas, kerangka kebijakan moneter yang digunakan untuk menunjukkan capaian stabilitas harga. Kondisi ini memunculkan berbagai perdebatan mengenai efektivitas Inflasi Kebijakan moneter diarahkan untuk mengendalikan stabilitas harga atau inflasi.

Menurut (Hakim, 2015) Penerapan kebijakan moneter ITF di Indonesia menjadi perdebatan karena ada kelebihan dan kekurangan. Mereka yang mendukung ITF percaya bahwa pelaksanaannya memerlukan komitmen yang kuat dari otoritas moneter untuk mencapai tujuan inflasi yang telah ditentukan sebelumnya, dan bahwa prasyarat ITF berlaku untuk hampir semua kerangka kebijakan moneter. Selain itu, pengalaman di banyak negara yang menerapkan ITF dapat dicapai secara bertahap mulai dari sedang hingga selesai, dan prasyarat yang diperlukan tidak harus dipenuhi sepenuhnya. Meskipun belum terpenuhi prakondisi yang diperlukan, ITF dapat diterapkan dengan sifat yang fleksibel dan mengedepankan kejelasan serta fitur penting seperti independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, pihak yang kontra menunjukkan bahwa ITF belum menuai hasil yang diharapkan, dan Bank Indonesia masih menemui kendala dalam mengontrol inflasi. Oleh karena itu, perlu perbaikan dalam menetapkan instrumen kebijakan yang tepat untuk inflasi aktual sesuai dengan target inflasi.

Menurut (Briliant, 2020), Pencapaian kebijakan ITF tidak dapat dikatakan berhasil, hasil operasi ITF ketika dimulai pada tahun 2005 jauh dari harapan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat saat ini Indonesia sedang dalam tahap trial and error implementasinya. Namun, seiring waktu, efektivitas ITF selama menstabilkan inflasi mulai muncul dengan mencapai target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selama empat tahun terakhir, yaitu dari 2015 hingga 2018. Walaupun kebijakan ITF dianggap berhasil oleh Indonesia, ada beberapa pendapat yang menentang penggunaan kebijakan tersebut.

Menurut (Fitriyani,dkk 2023) meneliti sejak berdirinya Flexible ITF dari tahun 2008 hingga 2021, menyatakan bahwa Tujuan inflasi Bank Indonesia belum tercapai secara pasti karena masyarakat tidak menganggap target inflasi sebagai tolok ukur yang sah, dan ada masalah dengan komunikasi kebijakan di seluruh entitas pemerintah. Dalam situasi ini, tingkat inflasi aktual masih berjuang untuk mencapai sasaran inflasi Bank Indonesia, sehingga terdapat kesenjangan antara tingkat inflasi aktual dan sasaran inflasi. Namun Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang luas untuk mengkomunikasikan kerangka kebijakan kepada publik melalui seminar dan diskusi meja bundar dengan para bankir, akademisi, pejabat pemerintah, pejabat kantor wilayah Bank Indonesia dan media. Komunikasi diperkuat dengan pengumuman kebijakan triwulanan untuk membangun konsistensi, prasyarat utama yang mengkomunikasikan kebijakan penargetan inflasi. Selain itu, koordinasi kebijakan dengan otoritas fiskal diperkuat untuk mengurangi potensi inflasi tekanan melalui konsultasi reguler pada waktu yang tepat untuk penyesuaian harga yang diatur (Juhro dan Goeltom, 2015).

Sebuah studi oleh (Dabboussi, 2014) meneliti kinerja ekonomi selama periode 1980-2012 di 53 negara berkembang termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa pilihan ITF bermanfaat bagi ekonomi berkembang, konsisten dengan studi sebelumnya. Hasil rata-rata inflasi dan volatilitas inflasi mendukung ITF. Negara-negara yang telah mengadopsi ITF telah mengalami volatilitas pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penargetan inflasi di negara berkembang akan memberikan kontribusi yang efektif untuk mencapai kinerja ekonomi yang sehat.

Sementara dalam penelitian (Romadhiningrum, 2018) menggunakan data sekunder untuk mengamati efektivitas penerapan kebijakan ITF pada periode 2005 hingga 2016 pada 37 negara berkembang dan 17 negara maju. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas penerapan ITF lebih tinggi pada negara-negara maju daripada negara-negara berkembang.

Menurut (McKibbin dan Wang, 2014) meneliti kinerja ekonomi negara penargetan inflasi selama penurunan global 2007-2012 dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kebijakan ini. Hasil dasar menunjukkan bahwa penargetan inflasi bekerja lebih baik daripada tidak penargetan.

Berdasarkan pendapat para peneliti melalui suatu jurnal penelitian sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan moneter target inflasi (ITF) masih menjadi perdebatan dan memerlukan temuan empiris yang kuat sebagai justifikasi. Pihak yang pro ITF berpendapat bahwa kebijakan ini memerlukan komitmen yang signifikan dari otoritas moneter untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. Namun, pihak yang kontra menunjukkan bahwa ITF belum menuai hasil yang diharapkan.

Meskipun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ITF dapat efektif dalam menstabilkan inflasi dan memberikan kontribusi yang efektif untuk mencapai kinerja ekonomi yang sehat, penelitian lain menunjukkan bahwa sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia belum tercapai secara tepat. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memandang target inflasi sebagai patokan yang dapat diandalkan, serta masalah dengan komunikasi kebijakan antar entitas pemerintah. Laju inflasi aktual juga masih sulit untuk memenuhi sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga terjadi kesenjangan antara laju inflasi aktual dan sasaran. Dengan demikian, efektivitas kebijakan ITF memerlukan perbaikan dalam menetapkan instrumen kebijakan yang tepat untuk inflasi aktual sesuai dengan target inflasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan analisis mengenai status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter dalam memerangi inflasi melalui penerapan ITF (Inflation Targeting Framework) :

1. Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan penting dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dengan lebih efisien dan efektif sebagai sebuah lembaga yang independen.
2. Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga dengan menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan moneter yang memengaruhi suku bunga, tingkat kredit dan jumlah uang yang beredar, yang tidak hanya memengaruhi pasar keuangan tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
3. Semenjak krisis mata uang yang terjadi pertengahan tahun 1997, dimana Indonesia mengalami inflasi yang meningkat secara signifikan dan membuat perekonomian Indonesia saat itu mengalami ketidakstabilan perekonomian. Oleh karena itu, Bank Indonesia mencari cara untuk memperkuat kebijakan moneter dalam mencapai kestabilan harga untuk menangani inflasi, membangun kredibilitas, dan meningkatkan stabilitas harga dengan menerapkan kerangka kerja inflation targeting framework (ITF) yang dianggap lebih efektif dalam menanggulangi inflasi dibandingkan dengan kerangka kebijakan base money targeting yang digunakan sebelumnya. Penerapan ITF membantu bank sentral menetapkan target kebijakan moneter yang eksplisit berdasarkan proyeksi dan sasaran inflasi di masa depan.
4. Kebijakan moneter target inflasi (ITF) di Indonesia masih menjadi perdebatan. Pihak yang pro ITF berpendapat bahwa ITF dapat menuntut komitmen yang tinggi dari otoritas moneter untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. Namun, pihak yang kontra menunjukkan bahwa ITF belum menuai hasil yang diharapkan, dan Bank Indonesia masih menemui kendala dalam mengontrol inflasi.
5. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pilihan ITF bermanfaat bagi ekonomi berkembang. Hasil rata-rata inflasi dan volatilitas inflasi mendukung ITF. Secara keseluruhan, pengaruh penargetan inflasi di negara berkembang akan memberikan kontribusi yang efektif untuk mencapai kinerja ekonomi yang sehat. Meskipun kebijakan ITF dianggap berhasil oleh Indonesia dalam empat tahun terakhir, masih terdapat pendapat yang menentang penggunaan kebijakan tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masyarakat belum memandang target inflasi sebagai patokan yang dapat diandalkan dan adanya masalah dalam komunikasi kebijakan antar lembaga pemerintahan. Tingkat inflasi aktual masih kesulitan mencapai target inflasi yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sehingga terdapat deviasi antara inflasi aktual dengan target inflasi.
6. Perbaikan dalam menentukan instrumen kebijakan yang tepat sangat diperlukan agar inflasi aktual dapat sesuai dengan target inflasi. Bank Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk membangun konsistensi dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan otoritas fiskal untuk mengurangi potensi inflasi tekanan.

Dapat digarisbawahi bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan yang penting untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dengan lebih efisien dan efektif sebagai sebuah lembaga yang independen. Penerapan kerangka kerja inflation targeting framework (ITF) oleh Bank Indonesia membantu menetapkan target kebijakan moneter secara eksplisit berdasarkan proyeksi dan sasaran inflasi di masa depan. Namun efektivitas kebijakan moneter target inflasi (ITF) masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, perbaikan dalam menentukan instrumen kebijakan yang tepat sangat diperlukan agar inflasi aktual dapat sesuai dengan target inflasi

5.2 Saran

Penulis menyarankan agar Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pelaksana kebijakan moneter harus lebih meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat secara jelas dan transparan. Untuk mencapai sasaran inflasi, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan penggunaan instrumen kebijakan moneter selain suku bunga, seperti operasi pasar terbuka dan persyaratan cadangan, untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter. Bank Indonesia harus tetap konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ITF dan memastikan bahwa kebijakan yang ditempuh sejalan dengan tujuan ITF dan sasaran inflasi yang ditetapkan. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dan memperkuat ekspektasi inflasi masyarakat serta efektivitas kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Al Ikhsan, "Studi Literasi Pengendalian Inflasi Menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF) Dalam Mengendalikan Tingkat Inflasi di Indonesia.," (2020).
- [2] R. H. R. T. O. & M. D. Assa, "Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia Periode: 2006.1-2019-2," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), (2020).
- [3] D. Boediono, "Ekonomi Moneter Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.," (2014).
- [4] D. Brilliant, "Efektivitas Rezim Kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF) Terhadap Inflasi di Indonesia.," *Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis & Manajemen.*, (2020).
- [5] O. M. Daboussi, "Economic performance and inflation targeting in developing economies," *Journal of World Economic Research*, (2014).
- [6] J. Darisa, "SUATU TINJAUAN TERHADAP KELEMBAGAAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2009," *LEX PRIVATUM*, 9(6), 2021.
- [7] T. P. Darma, "Penerapan Flexible ITF (Inflation Targeting Framework): Sinergitas Kebijakan Moneter Indonesia dengan Sasaran Kestabilan Harga," *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, (2017).
- [8] J. V. Graziani, "Peran dan Fungsi Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia," *Lex Administratum*, 6(3), (2019).
- [9] R. Hakim, "Meninjau kembali seberapa penting target inflasi Bank Indonesia dalam mengontrol laju inflasi," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 20(1), 53-71, (2016).
- [10] B. Indonesia, "Tujuan Kebijakan Moneter," 2020. [Online]. Available: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter>. [Accessed 15 Maret 2023].
- [11] S. M. Juhro, "The Role of the Central Bank in Promoting Sustainable Growth: Perspectives on the Implementation of Flexible ITF in Indonesia," *Afro Eurasian Studies*, 4(1), 23-61, (2015).
- [12] S. E. Kasmir, "Bank dan lembaga keuangan lainnya.," 2015, p. 390.
- [13] B. Muktar, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain," Prenada Media., 2016, p. 161.
- [14] B. Murdadi, "Independensi Bank Indonesia Di Persimpangan Jalan," *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), (2012).
- [15] M. K. R. J. & M. D. Osok, "Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2008.1-2017.IV," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), (2019).
- [16] J. Pinem, "Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009," *Lex Privatum*, 9(12), (2021).
- [17] S. A. (. Pinilih, "Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, (2017).
- [18] R. D. W. A. A. & C. C. Pratiwi, "Studi Literatur Peran Bank Indonesia Terhadap Stabilitas Keuangan," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 748-753, (2022).

- [19] Prof.Dr.Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis," *Bandung: Alfabeta.*, (2010).
- [20] T. & D. D. C. Pusriadi, "Penerapan flexible ITF (Inflation Targeting Framework): sinergitas kebijakan moneter Indonesia dengan sasaran kestabilan harga," *In Prosiding SNMEB (Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis)*, (2018).
- [21] I. Putong, "Economis: Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro," *Jakarta: Ghalia Indonesia*, (2013).
- [22] A. & S. A. Putra, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya," *CV. Jakad Media Publishing*, (2020).
- [23] C. Romadhiningrum, "Efektivitas Kebijakan Moneter di Negara-Negara ITF dan Non-ITF: Studi Komparatif Negara Maju dan Negara Berkembang," 2018.
- [24] A. B. Santosa, "Analisis Inflasi di Indonesia," (2017).
- [25] J. P. Saragih, "Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal Terhadap Pencapaian Target Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi," *Kajian*, 20(2), 163-182, (2016).
- [26] S. Saridawati, "Analisis Peran Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Rate Terhadap Nilai Tukar US \$ dan Inflasi," *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), (2015).
- [27] A. Setiawan, "Inflation Targeting Framework dan Perubahan Respon Kebijakan Moneter," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 5, 65-76, (2012).
- [28] I. Simorangkir, "Pengantar kebanksentralan teori dan praktik di Indonesia.," Rajawali Pers., 2014.
- [29] R. F.-M. Wang, "Does Inflation Targeting Outperform Alternative Policies During Global Downturns? CAMA Working," (2014).
- [30] P. & J. Warjiyo, "Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik," Depok, Rajawali Pers, 2019, p. 316.
- [31] P. & J. S. M. Warjiyo, "Kebijakan moneter di indonesia (Vol. 6)," *Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*, (2017).
- [32] P. Warjiyo, "Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia (Vol. 11)," *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*, (2017).
- [33] E. Winarsih, "Terserusnya Independensi/Kemandirian Bank Indonesia," *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, 5(1), 2659-2668, (2021).
- [34] A. H. & E. S. Yassirli, "Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi dan Perekonomian di Indonesia," *Ejournal. up. ac. id*, (2014).